



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MALAKA TAHUN 2020**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 1 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020

PEMOHON

- Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango (19/PHP.BUP-XIX/2021)
- Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin (24/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Sumba Barat
- KPU Kabupaten Malaka

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**Senin, 1 Februari 2021, Pukul 08.08 WIB – 09.49 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Siska Yosephin Sirait
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Agustinus Niga Dapawole
2. Gregorius H. B. L. Pandango

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Umbu Rauta
2. Christo Laurenz Sanaky
3. Nimrod Androiha
4. Nimerodi Gulo

C. Termohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

Teguh Rahardjo

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

Melkianus Ndaomanu

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Semianda Umbu Kabalu
2. Rian Van Frits Kapitan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

Bram Perwita Anggadatama

G. Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

Stefanus Manhitu
Makarius Bere Nahak
Yosef Nahak
Juventus Adrianus Bere
Thomas Dohu
Jefry Jalal

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Budi Rahman
2. Abdul Haris
3. Asep Andryanto
4. Maulana Mediansyah
5. Megi Sumeggie

6. Nuragian Sugianto

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yanuarius Nahak Taek
2. Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen
3. Melkianus Conterius Seran
4. Yulius Benyamin Seran
5. Egidius Klau
6. Yosef Remerius Nahak

J. BAWASLU:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Fritz Edward Siregar | (Bawaslu RI) |
| 2. Melphi M. Marpaung | (Bawaslu Prov. NTT) |
| 3. Thomas Mauritius Djawa | (Bawaslu Prov. NTT) |
| 4. Jemris Fointuna | (Bawaslu Prov. NTT) |
| 5. Baharudin Hamzah | (Bawaslu Prov. NTT) |
| 6. Noldi Tadu Hungu | (Bawaslu Prov. NTT) |
| 7. Papi Balla Ndjurumana | (Bawaslu Kab. Sumba Barat) |
| 8. Yusti Rambu Karadji | (Bawaslu Kab. Sumba Barat) |
| 9. Oktavianus Malo | (Bawaslu Kab. Sumba Barat) |
| 10. Petrus Nahak Manek | (Bawaslu Kab. Malaka) |
| 11. Petrus Kanisius Nahak | (Bawaslu Kab. Malaka) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.08 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang lanjutan dalam Perkara PHP untuk Perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021 dan 2 ... dan 19/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dimulai, dibuka, dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum saya meminta untuk memperkenalkan diri, perlu saya sampaikan. Begini, jadi sebagaimana persidangan awal, ya, protokol kesehatan harus kita tegakkan. Ada beberapa hal yang perkembangan terbaru di lapangan, itu begini. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa bisa menggunakan surat yang antigen yang masih berlaku 2 hari. Tapi juga saya tekankan, apabila dianggap perlu atau dicurigai karena suhu tubuhnya dan suratnya itu meragukan, maka kewenangan kita untuk melakukan tes antigen lagi. Ternyata setelah diantigen lagi, ternyata positif atau reaktif hasilnya. Maka sekali lagi, ya, ini sidang terbuka yang bisa disaksikan oleh sebelumnya ... yang akan sesudahnya nanti persidangan yang akan datang, maka kewenangan untuk melakukan rapid tes antigen adalah kewenangan kita.

Jadi, di lapangan ada berbantah, "Kita boleh menggunakan surat, enggak mau lagi". Nah, itu enggak bisa, tapi ternyata sudah ada surat, diantigen lagi, ternyata reaktif atau positif, sehingga kewenangan kita. Itu di instansi mana pun dalam rangka menegakkan protokol kesehatan juga begitu. Kita juga begitu, misalnya kayak ada acara resmi kenegaraan di istana, itu juga di sana kita sudah punya. Bukan hanya rapid, tapi PCR, itu di sana juga dites lagi. Jadi, itu kewenangan tuan rumah, bagaimana memperlakukan standar kesehatan dan protokol kesehatan. Itu harus dipatuhi, ya? Jadi, jangan terus kemudian menjadi berbantah di bawah, itu akan merepotkan semuanya. Dan ternyata kemarin setelah dicurigai, ada yang sudah punya surat, ternyata dites lagi di sini, reaktif. Nah, kalau begitu, kan berbahaya untuk kita semua, ya.

Terus yang kedua, tetap seperti yang kemarin, apa yang disampaikan adalah pokok-pokoknya saja. Dokumen yang tertulis, nanti bisa dipelajari bersama.

Kemudian, sekarang kita mulai untuk Pemohon 24/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir siapa sekarang? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BRAM PERWITA ANGGADATAMA

Yang Mulia. Nama saya Bram Perwita Anggadatama.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pemohon 19/PHP.BUP-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA

Baik. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Pemohon Perkara 19/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir secara langsung saya Dr. Umbu Rauta. Dua, Christo Laurenz Sanaky, S.H. Dan, Yang Mulia, hadir secara online, Prinsipal, Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius Pandango. Dan dua Penasihat Hukum, Nimrod Androiha dan Dr. Nimerodi Gulo.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Termohon 24/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Termohon 24/PHP.BUP-XIX/2021 dari Kantor Sultan Al Fatih and Co Law Firm. Hadir dalam persidangan, saya sendiri Budi Rahman. Kemudian ada Prinsipal kami, Bapak Stefanus (Anggota KPU Bidang Hukum).

Kemudian, hadir secara online, Pak Ketua Bapak Makarius Bere Nahak, kemudian Bapak Yosef Nahak, kemudian Bapak Yufrentus ... Juventus Adrianus Bere, juga ... apa ... dari KPU Provinsi NTT, hadir Pak Ketua menyaksikan, Bapak Thom Dohu, kemudian Bapak Jefry Jalal. Kemudian, Kuasa Hukum dari kami, Bapak Abdul Haris, Asep Andryanto, Maulana Mediansyah, Megi Sumeggie, dan Nuragian Sugianto.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon 19/PHP.BUP-XIX/2021?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Izin, Yang Mulia. Saya memperkenalkan diri saya, Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., Kuasa Hukum dari Termohon dalam Perkara 19/PHP.BUP-XIX/2021. Yang hadir juga Teguh Rahardjo, yaitu Termohon. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu Perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

10. BAWASLU PROVINSI NTT: MELPHI M. MARPAUNG

Mohon izin, Yang Mulia. Saya dari Bawaslu Provinsi NTT, atas nama Melphi Marpaung. Saya mendampingi 2 perkara, dari Sumba Barat Perkara 19/PHP.BUP-XIX/2021, ada Papi Balla Ndjurumana (Anggota Bawaslu). Kemudian Yusti Rambu (Ketua Bawaslu Sumba Barat).

Dari Perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Malaka, ada Petrus Nahak Manek. Kemudian secara daring, Yang Mulia, ada Pak Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI), dan dari Bawaslu Provinsi NTT Pak Thomas Mauritius Djawa (Ketua Bawaslu NTT), Jemris Fointuna (Anggota Bawaslu NTT), Baharudin Hamzah (Anggota Bawaslu NTT), Ibu Noldi Tadu Hungu (Anggota Bawaslu NTT). Kemudian, Oktavianus Malo dari Anggota Bawaslu Sumba Barat, Petrus Kanisius Nahak (Anggota dari Bawaslu Kabupaten Malaka).

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini Anda mewakili Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

12. BAWASLU PROVINSI NTT: MELPHI M. MARPAUNG

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: YANUARIUS NAHAK TAEK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Yanuarius Nahak Taek, S.H. Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Yang hadir dalam ruang sidang, saya sendiri bersama rekan Ferdinandus Maktaen. Dan yang ikut persidangan secara daring, yaitu Melkianus Conterius Seran, Yulius Benyamin Seran, Egidius Klau, dan Yosef Remerius Nahak. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, kami dari Pihak Terkait yang hadir pada sidang hari ini, pertama saya selaku Kuasa Hukum Semianda Umbu Kabalu dan rekan saya, Saudara Rian Van Frits Kapitan.

Sekian, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum saya minta Pihak Termohon untuk menyampaikan jawabannya, ya. Perlu saya sampaikan di dalam Persidangan ini.

Satu, pokok-pokoknya saja yang disampaikan, ya. Kemudian Majelis meminta sekarang, baik Termohon Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021 maupun Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 itu menyampaikan jawabannya sekarang supaya diambil, ya. Ada berapa yang eksemplar itu? Tujuh, ya?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Tujuh, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tujuh. Langsung, Mas, yang itu juga Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021! Enggak, nanti dulu, nanti dulu, Mas! Kamu ambil yang di sini dulu! Yang Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 juga diambil, sudah? Itu Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021? Yang Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021? Ada tujuh, kan? Nah ... Mas, loh, jangan dibawa ke belakang! Ini dibagikan tiga kepada Hakim. Terus kemudian, dibagikan kepada Termohon, ya, dan disampaikan kepada Pihak Terkait. Jadi, tujuh itu Hakim tiga, ya. Kemudian, Termohon perkara satu-satu, kemudian Pihak Terkaitnya satu, yang lain untuk Kepaniteraan, ya. Jangan Pemohon dua dikasih! Karena Pemohon yang dua ini, satu berkepentingan untuk Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 dan yang satu berkepentingan untuk Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021. Jangan berdiri, duduk saja di situ! Ya, nanti diambil. Jadi, sudah ada Petugas. Kemudian, disampaikan juga kepada Bawaslu. Pemohonnya satu yang berkaitan dengan perkaranya, jangan dua-duanya. Ayo segera, cepat saja dibagi! Untuk Pihak Terkait juga begitu, ya! Supaya

dokumennya bisa segera dipelajari dan dibaca sambil mendengarkan apa yang disampaikan.

Kemudian pada kesempatan ini, jawaban Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu disampaikan pokok-pokoknya saja. Untuk Pemohon, tidak boleh melakukan respons apa-apa, ya? Jadi diam saja, Anda mendengarkan.

Kemudian setelah itu, nanti selesai persidangan ini, kita akan mengesahkan bukti, bukti dari Pihak Termohon, Pihak Bawaslu, dan Pihak Terkait. Untuk Pemohon sudah tidak bisa mengajukan bukti lagi, kecuali nanti di dalam persidangan lanjutan yang lanjut, itu bisa menambahkan bukti, ya.

Baik, sekarang Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan jawaban Termohon KPU Kabupaten Malaka dalam Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H. dan Wendelinus Taolin.

Sesuai arahan Yang Mulia Bapak Ketua, langsung pokoknya saja.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokok-pokoknya saja.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Dalam Eksepsi. Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Perbaikan Permohonan, Termohon terlebih dahulu Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Tentang Perbaikan Permohonan dalam persidangan 26 Januari 2021. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 26 Januari 2021 yang merupakan perbaikan kedua atas Permohonan yang telah diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 22.54 WIB, yang kemudian diregistrasi dengan ... diregistrasi dengan Nomor 24/PHP dan seterusnya. Perbaikan Permohonan yang dimaksud memiliki perbedaan, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya. Bahkan, Pemohon selalu terbuka menyampaikan adanya perubahan Petitum, sehingga dapat dikualifikasi sebagai penambahan Petitum baru.

Perbedaan Perbaikan Permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Perbaikan Permohonan yang diucapkan dalam sidang tanggal 26 Januari adalah antara lain.

Uraian tabel jenis modus pemilihan siluman awalnya terdiri dari 23 tabel, kemudian diubah menjadi 63 tabel. Judul awal setiap tabel adalah hanya satu judul, yaitu identifikasi jenis modus pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian dalam perbaikan kedua, judul tabel diubah menjadi beberapa jenis judul. Yaitu antara lain, rekap NIK yang tidak ada dalam database kependudukan dinas dukcapil dan NIK yang penduduk sudah pindah, tapi masih tercatat dalam DPT. Pemilih siluman memiliki nama berbeda-beda, tetapi memiliki NIK sama persis yang terdaftar dalam DPT, pemilih siluman yang memiliki nomor kartu keluarga, identitas pemilih siluman yang memiliki NIK yang penyusunan digital kodefikasi NIK-nya tidak sesuai dengan aturan baku penyusunan verifikasi NIK.

Adanya penambahan nama desa baru di seluruh kecamatan yang dipersoalkan. Petitum dalam Perbaikan Permohonan yang telah diregistrasi Mahkamah tanggal 18 Januari 2021 terdiri 11. Namun kemudian, dalam Perbaikan Permohonan yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, Petitum Permohonan menjadi 18. Perbaikan paling signifikan dari Petitum tersebut adalah adanya perubahan permintaan, yaitu mengenai dilaksanakannya pemilu ulang dalam kurun waktu 1 bulan. Petitum angka 8, diubah menjadi melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan, dan lain-lain.

Berdasarkan adanya Posita baru dan penambahan Petitum seperti diuraikan di atas, maka Perbaikan Permohonan yang kedua kalinya harus dianggap sebagai Permohonan baru yang berbeda dengan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020. Atau apabila dikategorikan sebagai Perbaikan Permohonan, maka Permohonan tersebut telah memasuki substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 13 PMK dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang anu, dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap Perbaikan Permohonan yang bersifat mengubah substansi, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati demi tegaknya hukum acara Mahkamah, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan a quo atau setidaknya menjadi tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian Termohon akan menjawab Permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bahwa pada pokoknya, keberatan Pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah oleh Termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah. Sehingga dalam kaitan itu, Termohon akan menguraikan proses penyusunan daftar pemilih dan mulai proses penyerahan Daftar Penduduk Potensial Dan Pemilih (DP4) dari Kemendagri sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap dalam satu rapat pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Bawaslu, seluruh tim pasangan calon, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020 seperti terurai di bawah ini.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini dianggap dibacakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Proses tahapannya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Proses itunya dianggap dibacakan, ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, yang dalil berikutnya?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Halaman 10, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, dan mengadili, memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021. Ini terkait tahapan-tahapan tadi, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kemudian Eksepsi obscur libel di halaman 11.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 6, dalil mengenai dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tidak jelas. Pemohon menghubungkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 peraih suara terbanyak dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 984 suara atau di bawah 2% adalah tidak benar dan kabur. Karena menurut Termohon juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 bukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan kabur, atau tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat materiil untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Poin selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Terkait dengan ... apa ... terstruktur, sistematis, dan masif.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kemudian, terkait dengan pelanggaran TSM. Lanjut ke halaman 14, Yang Mulia.

Dalil Pemohon mengenai Termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman serta definisi dan kualifikasi pemilih siluman (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang itu, maskernya dipakai, jangan dibuka!

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak apa-apa, terdengar, kok.

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Saya lanjutkan, Yang Mulia, ke halaman 14, poin 13. Dalil Pemohon mengenai Termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman serta definisi kualifikasi pemilih siluman versi Pemohon yang terdata dalam DPT dengan jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka, sebagaimana dimaksud dalam angka 10, 11, dan 12, Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Karena dalil yang diajukan oleh Pemohon hanyalah menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilih siluman dalam DPT dengan tidak menjelaskan bagaimana hubungan sebab-akibat antara adanya pemilih siluman tersebut dengan perolehan suara pasangan calon.

Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyajikan tabel dengan judul Identifikasi Jenis Modus Pemilih Siluman di daftar pemilih tetap Model A3-KWK mulai dari tabel 4 di halaman 6 sampai dengan tabel 26 halaman 44, tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan antara jenis modus pemilih tersebut dengan pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga, dalil Pemohon mengenai hal itu tidak memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan perolehan suara pasangan calon.

Poin 14. Dalil Pemohon mengenai TPS dicurigai menggunakan e-KTP siluman yang berdasarkan pada pengodean Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai dengan kodefikasi penomoran baku dari dukcapil dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu, sebagaimana tertuang dalam tabel 4, 5, 6, 7, 8, 13 sampai 26, Yang Mulia, dari mulai halaman 9 sampai dengan halaman 44 adalah dalil yang tidak jelas karena dalil tersebut didasarkan pada kecurigaan, dan asumsi Pemohon, serta tidak didasarkan kepada fakta hukum.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Selanjutnya dianggap dibacakan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selanjutnya, semua dianggap dibacakan.

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bergeser ke ... ke halaman 17, poin 19, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jangan terlalu detail yang disampaikan.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang menyangkut dalil-dalil besar saja, yang lain dalil-dalil kecil dianggap telah dibacakan dan diuraikan di halaman berapa, begitu, ya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Di poin 19, Yang Mulia, halaman 17. Bahwa setelah diteliti dan dicermati, ternyata Posita Perbaikan Pemohon tidak cermat dan kabur tanpa nama, NIK, termasuk TPS yang sama. Atas nama Maria Bubu, NIK 5304144701530001 di tiga desa, yaitu Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen, Desa Fatoin, Kecamatan Io Kufeu, dan Desa Uwalawain, Kecamatan Weliman, sebagaimana tabel 8, tabel 9, tabel 23 Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 12, 13, 37. Tabel 8 huruf a Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen. Ini ada tabelnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Tabel 9, kemudian tabel 23.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang berkaitan dengan seluruh tabel sampai tabel 25 kalau enggak salah itu, ya?

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

Bahwa setelah diteliti ... lanjut ke halaman 20, Majelis.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bahwa setelah diteliti, ternyata Posita Perbaikan Pemohon tidak cermat dan kabur, terdapat nama, NIK, termasuk TPS yang sama atas Agustinus Bria, NIK 53210 dan seterusnya. Antonius Asa, NIK 5304150107660017, dan Dominicus Sera, NIK 5304150107690084 di 2 desa, yaitu Desa Kereana, Kecamatan Botin Leo Bele dan Desa Wewiku ... Kecamatan Wewiku sebagaimana di tabel 11 dan tabel 25 Perbaikan Pemohon Permohonan halaman 19. Tabel 19 dianggap dibacakan.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kemudian, tabel 25 juga.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kemudian, sekarang ke halaman 22.

Bahwa alternatif Petitum angka 8 perbaikan Pemohon ... Permohonan Pemohon memerintahkan KPU Kabupaten Malaka setidaknya dilaksanakannya pemilu ulang di seluruh TPS dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam Petitum, Pemohon tidak meminta pemungutan suara ulang atau pemungutan ... penghitungan suara ulang atau penghitungan surat suara ulang. Pemohon meminta dilaksanakan pemilu ulang, sementara arti pemilu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu adalah pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ... jujur adil, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian, apabila yang dimaksud Pemohon adalah dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menyatakan pemilihan gubernur dan wali kota ... bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu diteruskan dianggap dibacakan.

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai konklusinya. Konklusinya apa ini?

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kita mengingatkan saja, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Terima kasih.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu ... konklusinya (...)

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kita ke (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

"Oleh karena itu, Petitem Pemohon tentang ini harus dinyatakan ditolak." Gitu, kan?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya, betul, Yang Mulia. Mohon izin sekarang ke halaman 26, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bahwa Termohon (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini (...)

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Menolak (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 25-nya kosong ini.

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya, 25-nya kosong, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak ada, ya?

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Itu ada pada saat kita kemarin edit sudah kosong.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya. Sekarang ke 26, Yang Mulia, pokok ... ke dalam pokok Permohonan.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam jawaban Termohon ini bahwa semua yang diuraikan pada bagian awal dan eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa perbaikan Termohon. Permohonan Pemohon didasarkan pada pencatuman pemilih siluman dalam DPT, terutama berkaitan dengan permasalahan penggunaan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang secara utuh telah diuraikan dan disandingkan oleh Pemohon. Bahwa perlu Termohon jelaskan, format salinan DPT yang diumumkan dan diserahkan kepada para pihak untuk keperluan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (3) ... ayat (13) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan, "Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), ayat (11), dan (12) tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga secara utuh, sehingga pencantuman NIK dan NKK secara utuh dalam Perbaikan Permohonan Pemohon adalah tidak sesuai

dengan ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2019.” Dalam kaitan ini, DPT yang dipermasalahkan oleh Pemohon, secara tegas Termohon sampaikan bahwa DPT tersebut bukan merupakan DPT yang dikeluarkan oleh Termohon. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan kemudian adalah dari mana sesungguhnya sumber data yang diperoleh Pemohon tersebut? Sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menyampaikan proses pemungutan perhitungan suara sampai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020.

Poin 23 dan poin 25, halaman 26 sampai 23 mengenai pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

20 sampai 23.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang menyangkut ... anu ... langsung. Bagian 2 sinkronisasi antara DP4 dan anu ... itu, langsung. Mengenai pemutakhiran data, ya. Saudara sudah menyampaikan tentang pemutakhiran data dan penyusunan DPT, ya.

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada halaman 32 dan seterusnya itu.

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara melakukan sinkronisasi, ya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anu ... pemutakhiran (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

DP4 dengan DPT Pemilu 2019.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Antara DPT tahun 2019 dengan DP4 yang baru, ya?

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya, betul, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kemudian, model penyusunan KWK juga (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dimutakhirkan, ya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, menurut Saudara, jumlah pemilih yang tepat di seluruh kabupaten, jumlahnya berapa? Anda menyampaikan di situ menurut kecamatan sudah disampaikan dalam tabel, ya?

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Sudah, Yang Mulia. Se ... kecamatan (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu upaya yang dilakukan ada cokolit dan sebagainya itu?

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya, izin melanjutkan, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Terkait dengan halaman 37.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Pencocokan dan penelitian cokolit data pemilih. Kegiatan pencocokan dan penelitian (cokolit) data pemilih didahului dengan kegiatan bimbingan teknis tentang tata cara cokolit, baik kepada panitia pemilihan kecamatan maupun kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPDP sesuai dengan buku kerja yang diterbitkan oleh KPU RI. Bimtek pada PPK dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 di Aula Susteran SSPS Betun, ada 60 peserta PPK bimtek kepada PPS dan PPDP dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 Juli 2020 di kecamatan se-Kabupaten Malaka, ada 127 peserta, Ketua Yang Mulia. Kegiatan bimtek juga

dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid secara ketat.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik. Dianggap dibacakan (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus terakhir, Saudara melakukan pemutakhiran data dan dilakukan dalam sidang ... sidang pleno ... anu ... KPU kabupaten?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu pemutakhiran dari DPS menjadi DPT?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Dan tidak ada keberatan (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dilakukan kapan itu?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Sesuai dengan tahapan, ada LO-nya segala macam.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Sekarang dilanjutkan, Yang Mulia. Ke halaman 46.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu hasil akhir dari penetapan DPT, jumlah pemilih berapa jadinya?

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Hasil akhir penetapan DPT (...)

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang 115.304 itu?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, betul?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya, 115.304, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, kan?

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah semua pasangan calon menandatangani DPT tetap itu?

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Menandatangani, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menandatangani?

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Tidak ada keberatan.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menandatangani betul?

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan?

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Tidak ada, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti dasar yang dipakai dalam pilkada ini sejumlah DPT-nya, Daftar Pemilih Tetapnya 115.304 itu, betul?

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul sekali, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Kemudian itu sudah ditandatangani semua, ya, tidak ada keberatan?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Sudah, tidak ada keberatan dari (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kan DPT itu sudah diumumkan?

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Sudah.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, baik. Terus?

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik. Mohon izin, saya lanjutkan, Yang Mulia. Ke halaman 46. Bantahan terhadap Pokok Permohonan poin 26. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir 355 TPS di 12 wilayah kecamatan dan 127 desa di Kabupaten Malaka adalah tidak benar. Karena pelanggaran TSM, menurut Pemohon merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pelanggaran TSM adalah pelanggaran administrasi yang menjadi domain Bawaslu Kabupaten Malaka untuk melakukan penindakan atas

pelanggaran tersebut dalam setiap tahapan dan pada setiap kegiatan, tingkatan.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka atas pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum secara TSM di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 kecamatan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, selebihnya tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran administratif terkait proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, yakni mengenai NIK yang kodefikasinya tidak sesuai dengan aturan kodefikasi penomoran baku yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar, dan penerbitan surat keterangan atau suket sejumlah 328 lembar oleh Disdukcapil Kabupaten Malaka kelebihan sebanyak 287 suara dihapus sebagian TPS. Kualitas tentang pemilu yang mudah dihilangkan, adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor 01, serta pelanggaran bersifat se ... sistematis ... terstruktur, dan masif yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara Paslon Nomor 01, dan mengurangi jumlah perolehan suara pemilih Pemohon adalah dalil yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan penghitungan ... hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dimana dugaan pelanggaran tersebutnya senyatanya merupakan domain kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya, tidak ada satu pun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan a quo.

Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon yang mempermasalahkan mengenai NIK yang tidak sesuai dengan aturan kodefikasi, KTP aspal, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar, penerbitan surat keterangan (suket) Discukcapil Kabupaten Malaka sebagai objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan tersebut bukanlah persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, akan tetapi persoalan administrasi kependudukan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemilihan. Jika pun persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, hanya terkait dengan pemilih ganda atau pemilih yang memilih ... pemilih lebih dari satu kali (quod non) yang ternyata dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 tidak ada satu pun permasalahan yang berkaitan dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket, serta pemilih ganda. Tidak ada satu pun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket atau (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar!

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Termohon, keterangan dari Bawaslu belum dikumpulkan, ya? Keterangan Bawaslu ... sebentar ... sebentar, saya mau menanyakan. Keterangan dari Bawaslu? Ya, di ... diambil itu biar bisa dibagikan segera! Ya, dibagikan sesuai tadi. Break sebentar, break sebentar!

Sambil saya tanya. Berarti Termohon (...)

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Membuat sistematika kualifikasi jawaban ini pada waktu menjawab Pokok Permohonan (...)

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengatakan, atau membagi, merespons dalil Permohonan Pemohon dari sistem ... anu ... ya ... menggunakan sistem TSM, ya?

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Yang pertama itu Anda membantah berkenaan dengan dalil-dalil yang bersifat sistematis?

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu halaman 10 sampai dengan (...)

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, kami uraikan, Yang Mulia. Penjelasannya.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, diuraikan itu?

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, betul?

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu halaman 66 sampai halaman 68, ya?

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, yang terakhir, membantah jenis-jenis pelanggaran yang bersifat masif?

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di halaman 69 sampai seterusnya. Kemudian, diakhiri dengan Petitum?

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul begitu?

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu bisa disampaikan pokok-pokoknya saja.

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, baik, Yang Mulia. Izin saya lanjutkan.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, supaya memudahkan kita untuk membaca dan teman-teman bisa membaca dengan baik.

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan!

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Izin saya lanjutkan.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, intinya untuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, Anda mengatakan semuanya tidak terbukti ... ditolak?

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Tidak terbukti, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian yang berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, demikian juga?

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya. Kemudian, terkait sistematis dan masif juga. Kemudian (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak (...)

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Terkait juga pengodean NIK yang tidak sesuai dengan verifikasi aturan baru juga, Yang Mulia (...)

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Tidak terbukti, di halaman 50. Kemudian (...)

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, Anda ini merespons dari seluruh rangkaian respons ini, ada respons yang dilakukan sebelum pemungutan suara, ya (...)

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan respons setelah dilakukan pemungutan suara?

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia. Bahkan (...)

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai kepada (...)

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ketika (...)

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Rekapitulasi sesuai dengan dalil Pemohon?

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia. Bahkan ketika Pemohon sekalipun mendalilkan itu satu per satu terhadap ... tetapi kenapa kita tetap jawab, Yang Mulia (...)

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Semuanya.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Tapi, secara general ... secara regulasi semuanya kita juga bantah, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Dan itu tidak terbukti, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus dilanjutkan sekarang!

208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Dilanjutkan, Yang Mulia (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang sudah mulai halaman berapa ini?

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Lanjut ke halaman (...)

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin berapa tadi?

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Halaman 52, Yang Mulia, saya lanjutkan.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 52?

214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya ... ya.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu, kan, berkaitan dengan NIK segalanya ... segala itu?

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul. Poin 42 (...)

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin 42?

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya. Jadi ... ini, Yang Mulia ... jadi, Pemohon menyampaikan ada ... apa ... setidaknya 2 nama yang sama dalam DPT TPS di 7 Desa Kamanasa. Ini ada beberapa nama (...)

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini, kan, menyangkut sebelum mulai dilakukan pemungutan suara, kan, baru menyangkut daftar pemilih tetap, kan?

220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya. Jadi, dugaan pemilih ganda, Yang Mulia (...)

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Dengan menggunakan C Pemberitahuan KWK ... e-KTP di Kecamatan Kamanasa. Di sini diuraikan oleh Pemohon ada atas nama ... dia menyebut nama, Yang Mulia (...)

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Itu atas nama Maria Bubu. Kemudian ... kemudian upaya ... upaya rekayasa nomor kartu keluarga di halaman 14 sampai dengan 17. Kemudian, atas nama di DPT TPS 7 Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah atas nama Natalia Luruk ... Luruk diduga memilih lebih dari 1 kali.

Kemudian poin 43, dalam TPS 4 dan DPTb TPS 1 Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah atas nama Benediktus Seran. Kemudian, tidak benar juga terdapat 2 nama dalam DP ... DPT TPS 4 dan TPS ... DPTb TPS 2 atas nama Benediktus Seran.

Kemudian, di poin 45 juga ada dalil Pemohon, yang menyatakan (...)

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sampai ke nomor 50 ... 50 lebih itu kalau enggak salah?

226. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia. Kita jawab semuanya, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu ada dalil-dalilnya, kan? (...)

228. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Dan itu tidak ada satu pun yang terbukti, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti Saudara bisa menyebutkan juga dalil ... anu ... buktinya.

230. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dimulai dari pada Bukti T-22.1 segala itu, ya?

232. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia. Jadi bantahan kami, sesuai dengan prinsip pembuktian MK, kami sudah lampirkan bukti. Dan itu tidak terbukti, satu pun tidak ada yang terbukti, Yang Mulia.

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini karena kita waktunya terbatas (...)

234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik-baik. Izin, Yang Mulia (...)

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya saya minta dokumen ini disampaikan untuk dipelajari bersama (...)

236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan penting untuk Hakim, untuk bisa merespons nanti dalam putusannya.

238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik. Mohon izin ke halaman 62, Yang Mulia, di luar jawaban tabel.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang langsung saja (...)

240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Poin 72.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Langsung saja yang terstruktur itu, apa itu? Di halaman 66, itu?

242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Halaman 66, Yang Mulia. Mohon izin (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang terstruktur, apa yang dimaksud Anda merespons pelanggaran yang bersifat terstruktur?

244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, baik, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dalil pokoknya saja yang disampaikan.

246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Jenis-jenis pelanggaran terstruktur. Bahwa dalil yang terdapat dalam angka 24 mengenai Termohon dengan niat jahat dan dengan sengaja memasukkan pemilih siluman ke dalam DPT yang bermasalah dengan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 TPS adalah dalil yang tidak benar. Karena dalil tersebut merupakan pengulangan dari beberapa dalil yang sudah disampaikan Pemohon dalam Permohonan yang juga sudah dijawab oleh Termohon. Namun demikian sejatinya, Pemohon menyampaikan keberatan tersebut ke lembaga lain yang berwenang untuk mengusut ... memutus permasalahan a quo.

87. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok Permohonan halaman 49 mengenai pelanggaran bersifat terstruktur. Nomor 25 mengenai Ketua KPU Malaka, yakni Makarius Bere Nahak melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU pada saat aksi kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Weoe, Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020 adalah tidak benar.

Bahwa atas kejadian tersebut, Ketua KPU Malaka dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka Nomor Laporan 009. Dimana kemudian Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan pada tanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya menghentikan status temuan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus sekarang yang halaman 68, itu semuanya poin 87, 88 dianggap dibacakan. Terakhir di halaman 68. Kesimpulan ini, bagaimana?

248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik. Berdasarkan uraian di atas, Termohon ... Termohon panitia pemilihan kecamatan telah memberikan informasi yang diminta oleh para saksi pasangan calon yang termuat dalam Berita Acara keberatan kecamatan atau Model D-Kejadian Khusus mengenai penambahan pemilih yang menggunakan KTP elektronik, dapat dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melindungi hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 37 ayat (1). Sehingga, dalil Pemohon mengenai DPT yang memuat pemilih siluman yang dipakai untuk mengu ... mengundang para pemilih siluman tersebut, terutama pemilih siluman yang menggunakan KTP elektronik tidak benar berdasar hukum.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang yang bersifat masif, intinya apa itu? Intinya saja. Anda menulis respons di halaman 89 (...)

250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya. Jadi, intinya memiliki nama yang sama, tetapi memiliki NIK yang berbeda. Itu, Yang Mulia.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu kan Anda uraikan di poin 89 dan 90, ya?

252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia. Karena memang diulang-ulang terus Permohonannya, jadi kami juga agak ... menjawab juga secara berulang sebagai penegasan, Yang Mulia.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ... ya, itu penegasan dan meminta ada ... anu kan ... yang terakhir, "Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran TSM untuk didiskualifikasi," juga ditolak, ya?

254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Petitumnya?

256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kita langsung ke Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.026.6-Kpt/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor satu. Pasangan Calon Dr. Simon Nahak, S.H, M.H. dan Saudara Luoise Lucky Taolin perolehan suara=50.890 suara.

Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H. dan Wendelinus Taolin mendapatkan perolehan suara 49.906.

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan jawaban dari Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021. Dari kami Kuasa Hukum KPU Kabupaten Malaka, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Dan saya kembalikan lagi ke Yang Mulia. Terima kasih.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, ya, KPU Termohon. Anda menyampaikan eksepsi agak saya tuntun saja biar cepat.

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Baik.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu?

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Terima kasih.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar! Apa? Loh, tadi ... tadi diminta, enggak diserahkan dulu. Dianu, Bawaslu mana ini? Tadi Bawaslu diwakili oleh satu orang, terus ini Bawaslu di kabupatennya? Tadi yang tadi sudah diserahkan, dari mana tadi? Malaka, sekarang dari? Sumba Barat. Diambil, Mas, dibagikan! Semuanya sudah dalam proses sterilisasi, ya?

Oke. Baik, KPU Termohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, Anda mengajukan eksepsi?

266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa ini eksepsinya?

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana?

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa tidak berwenang?

272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Mengacu pada Pasal 157.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

274. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Dan Pasal 156 (...)

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

276. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

278. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan juga PMK Nomor 6 Tahun 2020 (...)

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya terkait dengan perselisihan penetapan suara tahap akhir.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

282. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Akan tetapi dalam dalil Pemohon, itu berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan (...)

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

284. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Yang itu masuk dalam kewenangan Bawaslu.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

286. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Karena itu (...)

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada eksepsi mengenai kewenangan?

288. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus!

290. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian, dalam kepentingan kedudukan Pemohon, itu tidak diadakan keberatan (...)

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak keberatan. Dia mempunyai kedudukan hukum?

292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk tenggang waktunya?

294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Tidak di (...)

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak di eksepsi?

296. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, di eksepsi.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang pokok Permohonan, gimana pokok Permohonan?

298. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Masih eksepsi terkait dengan Permohonan tidak jelas, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, di dalam Permohonan ada eksepsi obscur Permohonan Pemohon.

300. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, ya, ya. Jadi (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan ini narasinya ada satu, dua, tiga, empat, ya?

302. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu narasinya?

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya.

306. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Dianggap dibacakan.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang dalam pokok Permohonan!

308. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Dalam pokok Permohonan angka 1 sampai dengan 11 dianggap dibacakan.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu menyangkut apa, 1 sampai 11?

310. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Itu menyangkut tata cara menurut regulasi yang ada.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dan kemudian daftar perolehan suara yang benar itu? Untuk Pihak Termohon?

312. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, ya, kemudian ... ya. Angka 11 itu perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dianggap dibacakan.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti T-10, ya?

314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu yang benar, ya?

316. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, yang benar yang itu, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi jumlah pemilihnya 650 ... 65.313.

318. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

65.313 suara.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 3?

320. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atas nama Agustinus dan pasangannya memperoleh 19.000?

322. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Nomor 1, yang menang adalah yang nomor 1, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, yang menang yang nomor?

324. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Nomor 1.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 1?

326. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

328. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Pemohon adalah Nomor 3.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon ini Nomor 3?

330. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, 19.534 pemenangnya?

332. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, betul?

334. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus!

336. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian, saya membantah dalil dari Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 247 dan seterusnya, dikatakan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing calon, terutama Pemohon itu tidak benar.

Kemudian, Pemohon mendalilkan bahwa ditemukan pemilih yang belum memenuhi syarat di desa ... di TPS 1 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, TPS 01 Kelurahan Waiheru, Kelurahan Loli. Ini juga disampaikan, tetapi tidak jelas nama, jumlah, dan alamat dari pemilih yang dikatakan di bawah umur.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

338. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Akan tetapi, andaikata yang dimaksud dengan pemilih itu atas nama Apriliana Ina, lahir tanggal 20 April tahun 2013 ... 2003. Kemudian Ignosius Nanlende, lahir tanggal 9 Oktober 2003. Kemudian, Yonathan Amaki, lahir tanggal 27 Juli 2001. Mereka semua itu memenuhi syarat untuk melakukan pemu ... memberikan suara.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk nyoblos, ya?

340. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, betul?

342. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus!

344. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian terkait dengan dugaan pelanggaran ini juga dari saksi Pemohon sendiri atas nama Yuliana Ngongo, itu tidak melakukan keberatan. Saksi ini juga menandatangani (...)

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanda tangan saksinya?

346. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, menandatangani Berita Acara sertifikat hasil perhitungan di 2 TPS dimaksud, Yang Mulia.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti T-4?

348. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

350. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian, dalil yang mengatakan bahwa ketua KPPS tidak memberikan DPT TPS 01 kepada pengawas dan seterusnya itu tidak benar di desa ... di Desa Manu Kuku, TPS 01 tidak benar. Hal ini dibuktikan juga dengan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atas nama Yuliana Ngongo. Kemudian, saksi ini juga menandatangani Berita Acara serifikat hasil perhitungan dan seterusnya, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Bukti T-9, T-11, T-4 itu?

352. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, Yang Mulia.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, Yuliana Ngongo itu saksi dari Pemohon tanta tangan?

354. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

356. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian, ada tidak benar bahwa KPPS di TPS 01 Desa Manu Kuku itu tidak memperlihatkan kepada pemilih dan saksi terkait dengan surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel, itu tidak benar. Bahkan, di situ juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atas nama Yuliana Ngongo, bahkan juga menandatangani Berita Acara sertifikat hasil perhitungan suara.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus kemudian, kalau ini saya tanyakan. Itu di tingkat TPS?

358. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, di tingkat TPS.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu di Tingkat Kecamatan Tana Righu?

360. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Itu juga idak ada keberatan.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Juga tidak ada keberatan?

362. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi Pemohon juga di situ (...)

364. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanda tangan?

366. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, tanda tangan.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti klir dari tingkat TPS dan tingkat kecamatan, klir tidak ada masalah?

368. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, tidak ada masalah, Yang Mulia.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus dilanjutkan!

370. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian, ada kecurigaan bahwa ada perolehan suara yang sama antara pasangan calon itu. Ada kecurigaan bahwa tidak wajar perolehan suara tersebut. Bahwa itu tidak benar. Karena memang perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disalin dalam Model C Hasil Salinan KWK TPS desa ... TPS 1 Desa Manu Kuku sudah sesuai dan tidak berbeda dengan yang tercatat dalam Model C Hasil KWK TPS Desa Manu Kuku. Dan juga di situ tidak ada pengurangan maupun penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan dalam TPS dimaksud, perolehan suara Pemohon lebih unggul dari Pihak Terkait (...)

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

372. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Sebanyak 10 suara.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

374. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Dan juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atas nama Yuliana Ngongo di tingkat TPS.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada nama Agustinus Molu Maulana ini, apa ini?

376. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Agustinus itu adalah pelapor dari Tim Sukses Pemohon di Bawaslu.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

378. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya. Kemudian (...)

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kaitannya dengan Bawaslu ini, ya?

380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, Yang Mulia.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

382. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Kemudian juga, ada didalilkan bahwa tidak terjadi penambahan surat suara dalam kotak suara TPS 01 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu. Di situ ada perbedaan perhitungan surat suara dengan daftar hadir pemilih, ada selisih 1 suara, 1 ... ya, 1 surat suara. Kemudian, dilakukan pencocokan penghitungan kembali dan jumlahnya itu sama. Jadi, tidak ada penambahan dan pengurangan di situ.

Kemudian juga, dalil dari Pemohon menyatakan bahwa Ketua KPSS TPS 01 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan, itu tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atas nama Yuliana Ngongo. Dan

juga, Saksi Yulian Ngongo menandatangani Berita Acara sertifikat hasil perhitungan suara di TPS yang dimaksud, Yang Mulia.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terakhir saya minta dijelaskan. Itu gimana ada rekomendasi Bawaslu mengenai KPPS yang tidak cakap itu gimana, sudah ... apa yang sudah dilakukan oleh KPU?

384. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Jadi ... ya, terhadap rekomendasi itu, KPU juga sudah menindaklanjutinya dengan menyampaikan ... memanggil ketua KPPS yang dilaporkan dan telah diberikan sanksi sesuai dengan yang rekomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu hanya masalah administrasi, ya?

386. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, masalah administrasi.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang?

388. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang yang diduga di 2 TPS dimaksud, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sekarang Petitumnya.

390. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya. Izin, Yang Mulia, saya bacakan Petitumnya, sehingga tidak keliru.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

392. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara, menolak Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/52 ... 5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 16.40 WITA.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Nama pasangan Calon Yohanis Dade, S.H. dan John Lado Bora Kabba perolehan suara=19.534 suara.
2. Marthen Ngailu Toni, S.P. dan Ir. Agustinus Bernadus Bora dengan perolehan suara=8.374 suara.
3. Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango, S.E., perolehan suara=19.473 suara.
4. Daniel Bili, S.H. dan Timotius Tede Ragga, S.Sos., perolehan suara=17.932 suara.

Total suara sah=65.313 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang kita mendengar keterangan dari Pihak Terkait, ya? Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 sambil saya pandu, ya, biar cepat. Saudara mengajukan eksepsi?

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Baik, Yang Mulia, kami mengajukan eksepsi.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya mengenai apa saja?

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Yang pertama itu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangannya?

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Ya.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, menurut Anda, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini?

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Yang Mulia. Karena (...)

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena Permohonannya tidak menyangkut perhitungan suara, gitu?

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Ya, tapi menyangkut dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus kemudian mengenai tenggang waktu, enggak ada masalah?

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Tenggang waktu, kami menganggap bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi sesuai, ya?

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Ya.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian?

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Yang berikut, terkait dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu materi Permohonan.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa?

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Karena berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 (...)

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Di sana sudah diberikan batasan mengenai substansi dari suatu Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Angka 4-nya. Menyatakan bahwa alasan-alasan Permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan perhitungan suara (...)

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus sekarang?

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Kemudian, dalam Petitem Permohonannya juga sudah dibatasi di dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020, yaitu memuat permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara dalam hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Akan tetapi, setelah Pihak Terkait mencermati keseluruhan substansi Permohonan Pemohon, ketentuan PMK Pasal 8 ayat (3) tersebut tidak diikuti, malahan Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 2 TPS.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Yang berikut tentang Permohonan Pemohon tidak jelas.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Pokok Permohonannya tidak jelas?

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Ya.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Obscuur, ya?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Ya, obscuur (...)

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Karena misalkan Pemohon mendalilkan bahwa adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin di TPS 1 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 1 Kelurahan Wee Karou.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Kecamatan Loli, namun Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Kemudian dalil Pemohon selebihnya, itu merupakan dalil yang juga kabur, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut dengan (...)

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perolehan suara?

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Berkurangnya perolehan suara yang harusnya didapat oleh Pemohon, sehingga dapat memberikan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, Yang Mulia. Demikian.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang lanjut pokok Permohonan?

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Pokok Permohonan, rekan saya, Yang Mulia.

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Terima kasih, Yang Mulia.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya saja, ya.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Pokok Permohonan kami akan tanggapi.

Yang pertama bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak Permohonan Pemohon karena Permohonan Pemohon cenderung mengenai dugaan pelanggaran administratif.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Bersifat asumptif dan tidak didasari oleh bukti-bukti yang sah.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Karena itu, tampak dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar, tidak beralasan hukum, serta cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Yang berikutnya. Bahwa Pihak Terkait memastikan tidak akan menanggapi Permohonan Pemohon dalam perbaikan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan selain dalam Permohonan Pemohon awal tanggal 18 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 21 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Yang berikut, terkait dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon. Ada beberapa pelanggaran administrasi, baik itu dalam proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Itu diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonan, poin IV, angka 9 dan 10, huruf a sampai dengan g, sebagaimana kami uraikan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat, adanya DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPPS Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. Berita Acara Sertifikat Perhitungan Suara TPS 1 Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran. TPS Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, ada tambahan 1 surat suara dalam kotak suara. Ketua KPPS Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu Bukti PT-3, PT-4, ya, PT-5 itu?

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus dilanjutkan?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, menurut Pihak Terkait bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut atau catatan-catatan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum. Sebab semua rangkaian proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS 001 Manu Kuku, maupun pada salah satu TPS yang didalilkan oleh Pemohon secara tidak jelas, TPS 001 Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Kota Waikabubak, semua tahapan proses rekapitulasi mulai dari 2 TPS yang didalilkan sampai di tingkat kecamatan, bahkan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten, proses tersebut berjalan dengan baik dan angka yang dihasilkan adalah angka yang sama.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Rekapitulasi tersebut berjalan dengan konsisten, hasil yang diperhitungkan benar dan akurat (...)

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu sudah. Dianggap dibacakan.

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, Yang Mulia.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada Saksi Pemohon, Bobi Woleka yang tidak tanda tangan di tingkat Kecamatan Loli, bagaimana ini?

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk rekapitulasi perhitungan suara terkait dengan Saksi Bobi Woleka yang tidak menandatangani surat keberatan atau Formulir C-KWK, kami tanggapinya bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum. Karena dalam formulir yang disediakan oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Saudara Saksi Bobi Woleka tidak menyatakan keberatannya secara resmi, Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan?

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi dia tidak tanda tangan, ya?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Tidak menandatangani, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di tingkat kecamatan? Rekap di tingkat kecamatan, ya?

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kecamatannya, Kecamatan Loli?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, siap.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU, surat keberatan itu tanda tangannya di formulir apa itu?

471. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Untuk keberatan, itu harus ditandatangani di formulir kejadian khusus dan keberatan (...)

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, form-nya, form apa?

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

C-1 (...)

474. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

C-1 ... D ... D keberatan, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT

D kan?

476. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini berarti anu itu (...)

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Punyamu salah ketik ini, C itu.

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, siap, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam Model D, kan?

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Siap.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, ada lagi yang akan disampaikan?

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Berikut, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait terlampau merasa sangat jauh menanggapi Permohonan Pemohon karena tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa perselisihan perolehan suara yang merupakan bagian daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya apakah Pemohon sebenarnya pemegang ... pemenang dalam Pilkada Sumba Barat? Berapakah perolehan suara yang sebenarnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa, dan di mana terjadi pengurangan atau penggelembungan suara?

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Karena itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diukur secara pasti, bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu kesimpulannya?

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, maka menurut Pihak Terkait sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Petitumnya sekarang!

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: SEMIANDA UMBU KABALU

Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.

Demikianlah, keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara a quo. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Semianda Umbu Kabalu, Rian Van Fritz Kapitan. Terima kasih, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021. Anda mengajukan Eksepsi?

494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya. Terima kasih, Majelis. Kami mengajukan Eksepsi.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Eksepsi berkenaan dengan apa?

496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Soal kewenangan mengadili.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kenapa, kok, tidak berwenang Mahkamah?

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Oleh karena Permohonan yang dia ... diajukan oleh Pemohon lebih banyak pada kewenangan administrasi dan ... kewenangan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Kedu ... Kedudukan Hukum, Anda melakukan Eksepsi?

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Kita ke Eksepsi yang kedua itu soal Permohonan yang obscur libel.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti mengenai Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu tidak ada eksepsi, ya?

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Obscur libel itu kita menitikberatkan pada ... soal Permohonan terkait ... berkaitan dengan politik uang.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Dimana dalam proses pemilihan kemarin, justru yang melakukan politik uang dan telah mempunyai putusan pengadilan itu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 02 dengan Putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.ATW tanggal 7 Januari 2021 ... di halaman 7, Majelis.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 7 (...)

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Halaman 7 paragraf terakhir.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sebentar. Jadi, sebetulnya yang melakukan politik uang itu malah Pihak Pemohon?

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya. Itu sudah mempunyai putusan pengadilan, Majelis.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Putusan pengadilan yang Nomor 112 itu?

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus? Apa lagi?

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Untuk terkait dengan eksepsi itu kami hanya sampai situ. Sekarang kami masuk ke (...)

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan?

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya, Pokok Permohonan, Majelis.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Pada halaman 12, angka 6 ... poin 6.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 12. Yang lain dianggap dibacakan, ya.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya, yang lain dianggap dibacakan.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, halaman 12 apa itu?

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Halaman 12 itu terkait dengan surat klarifikasi dari Bawaslu berkaitan juga dengan pemilih siluman.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Gimana?

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Bahwa sebagaimana termuat dalam Surat Berita Acara Klarifikasi Nomor DKPS.474/08/I/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, Ferdynandus Rame, S.Ip., M.Si, tanggal 14 Januari 2021, dalam poin 3 mengatakan bahwa saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka menyampaikan permohonan maaf kepada KPU Malaka atas sinkronisasi data yang kami lakukan dengan menggunakan DPT pemberian Bupati Malaka, Dr. Stefanus Bria Seran, MPH, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam database kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malaka. Dan sebenarnya kami harus melakukan sinkronisasi dengan menggunakan DPT dari KPU Kabupaten Malaka.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Oke.

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya, itu yang selanjutnya kami (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya.

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya, dianggap dibacakan, Majelis.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Kami lanjut ke (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang halaman 13b itu yang berhubungan dengan ... anu ... ya (...)

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi, ya?

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus?

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Kami lanjut ke halaman 14, poin 9, Majelis.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin 9.

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin 21, halaman 48, yang kembali menerangkan adanya praktik politik uang.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut.

a. Soal politik uang (...)

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu dianggap dibacakan (...)

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Dianggap dibacakan (...)

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi sudah (...)

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Dan mungkin kami bacakan yang b saja, Majelis. Karena belum terbacakan tadi.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu (...)

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Soal gaji fukun dan kompensasi kepada lembaga adat, dapat kami jelaskan bahwa tuduhan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan tidak beralasan hukum dan secara tegas Pihak Terkait menolak, oleh karena berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang kedua, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Masyarakat ... Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa, Lembaga Adat Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Wehali ... izin, Majelis, ini salah ... salah (...)

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu berdasarkan gaji atau kompensasi lembaga adat itu sebetulnya yang membuat SK siapa, sih?

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Yang membuat SK adalah bupati atau yang menjadi ter ... Pemohon sekarang.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Bupati incumbent berarti?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus ... seterusnya?

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya. Seterusnya kami (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang berkaitan dengan orasi politik itu, kan berkaitan dengan itu, ya?

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Jadi, gaji, kompensasi lembaga adat itu sebetulnya (...)

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Sudah ada dalam peraturan bupati.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 dan Nomor 8 Tahun 2020?

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya, Majelis. Sehingga dijabarkan (...)

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu ... SK itu yang membuat malah Pemohon?

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya. SK itu yang dibuat oleh Pemohon.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi tinggal melanjutkan, bukan yang buat Pihak Terkait? Bukan janji, ya?

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Bukan. Ya. Bukan janji politik, tapi kita meneruskan apa yang sudah ada.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Ya.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus? Apa lagi?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Poin 11, angka a, b itu dianggap dibacakan.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Dan poin-poin berikutnya, kami anggap sudah dibacakan, Majelis.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Kita masuk kepada langsung Petikum, Majelis.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN

Oleh rekan saya, Majelis.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: YANUARIUS NAHAK TAEK

Baik. Terima kasih, Majelis. Kami lanjutkan pada Petitum.

Berdasarkan alasan argumentasi hukum, legal reasoning, dan fakta hukum (legal fact) tersebut dalam uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum DPT Model A-3 KWK yang diterbitkan Termohon untuk digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 karena Termohon telah menerbitkan DPT Model A KWK (...)

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini dianggap dibacakan ini.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: YANUARIUS NAHAK TAEK

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tolong yang dibacakan yang berkaitan dengan nomor 9. Yang 5, 6, 7, 8 dianggap dibacakan. Nomor 9?

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: YANUARIUS NAHAK TAEK

Baik. Kami lanjutkan.

Nomor 9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk tetap menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. dan Louise Lucky Taolin, S.Sos. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Malaka Periode Tahun 2021-2026.

Poin 10. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H. dan Wendelinus Taolin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020.

Poin 11. Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka ... Kabupaten Malaka untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pihak Terkait, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. dan Louise Lucky Taolin, S.Sos. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta, tanggal 1 Februari 2022[Sic!]. Kami Tim Kuasa Hukum yang hadir, saya atas nama Yanuarius Nahak, S.H. dan Ferdinandus Maktaen.

Terima kasih, Majelis.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan keterangan dari Bawaslu Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu Sumba Barat. Yang di depan itu dianggap dibacakan.

581. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Ya.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana yang disampaikan oleh Pemohon yang berkaitan dengan wewenang dari Bawaslu saja yang disampaikan, apa yang ... rekomendasinya pernah mengeluarkan rekomendasi atau tidak? Rekomendasinya dijalankan atau dilakukan oleh KPU atau tidak? Apa saja yang sudah dilakukan? Itu saja. Jangan membacakan ini! Ini sudah kita sudah baca nanti.

583. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Baik, Yang Mulia.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada ... Anda memisahkan menjadi dua, ada keterangan pokok dan keterangan tambahan. Itu yang keterangan pokok, apa yang akan Anda sampaikan?

585. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Keterangan pokok itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran, laporan.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang penanganan pelanggaran saja, kalau pengawasan, kan itu kan memang wewenang Anda.

587. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Siap.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam melakukan pengawasan, ada pelanggaran, enggak?

589. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Ada.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada? Apa itu?

591. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Yang dilaporkan oleh Termohon?

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh. yang dilaporkan oleh Pemohon atau Termohon? Kok (...)

593. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Pemohon.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

**595. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Pemohon.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon, kan?

**597. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Pemohon Nomor 3.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apa itu?

**599. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Itu terkait kejadian di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, kenapa? Terus, bagaimana ... setelah ada laporan itu, bagaimana Bawaslu? Apa yang dilakukan oleh Bawaslu?

**601. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Bawaslu mengundang untuk melakukan klarifikasi terhadap terlapor, dalam hal ini ketua KPPS bersama anggota. juga mengundang terlapor, dalam hal ini Agustinus Maulana sebagai unsur Pemohon.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hasilnya bagaimana terakhir?

603. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Hasilnya, yang pertama terkait pemilih di bawah umur. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, tidak ditemukan.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada pemilih di bawah umur?

605. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Pemilih di bawah umur, ya.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, satu. Terus, apa lagi?

607. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Yang kedua, terkait dengan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan oleh ketua KPPS bersama anggota dalam memulai pemungutan dan perhitungan suara.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em. Ada kesalahan di situ? Rekomendasinya bagaimana?

609. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Di situ hasil penanganan pelanggaran menemukan ketua KPPS berpotensi melanggar PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang salah satunya tidak membuka pemungutan suara secara resmi dan tidak mengambil sumpah (...)

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus bagaimana ini?

611. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Untuk anggota KPPS bersama petugas ketertiban TPS.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus!

613. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Hal itu kami lakukan rekomendasi kepada KPU Sumba Barat karena ini pelanggaran administrasi (...)

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Administrasi.

615. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Untuk memberikan sanksi administrasi kepada ketua KPPS bersama anggota. Sanksi pertama yang kami ajukan, usulkan, agar yang bersangkutan tidak lagi direkrut sebagai penyelenggara ad hoc pada pemilu dan pemilihan yang akan datang.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang akan datang. Tapi dalam proses itu, masih tetap terus disupervisi?

617. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Yang kedua, kami minta KPU Sumba Barat bersama jajarannya untuk melakukan supervisi.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

**619. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Terhadap jajaran ad hoc di bawah.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**621. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Yang berikut, rekomendasi yang ketiga. Kami meminta KPU Sumba Barat dalam merekrut ad hoc di bawahnya untuk melakukan secara baik dan memilih orang-orang yang mampu untuk melakukan tugas secara baik.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, itu menyangkut kompetensi dari (...)

**623. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Ya.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TPS yang anu ... KPPS yang tidak kompeten, ya?

**625. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Ya, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sudah dilakukan, ya?

**627. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA
NDJURUMANA**

Ya.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, apa lagi yang ditemukan? Itu yang pokok?

629. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Yang pokok, ya.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tambahan, ada? Apa yang tambahan di luar pokok?

631. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Tidak ada, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada? Oke. Ada lagi yang akan disampaikan, Bawaslu? Cukup dua itu?

633. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Ya, terbaca dalam keterangan tertulis.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Ada dalam keterangan tertulis. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Dalam penghitungan suara dan sebagainya, tidak ada persoalan?

635. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Tidak ada persoalan.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada persoalan.

637. BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT: PAPI BALLA NDJURUMANA

Hanya yang terjadi di tingkat rekapitu ... rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor 3 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, baik. Ya, sudah. Cukup, ya? Terima kasih.
Sekarang Bawaslu Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021!

639. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Izin, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

641. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Menyampaikan keterangan atas hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran. Yang pertama, yang didalilkan oleh Pemohon, yakni pada halaman 2.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, agak cepat anunya!

643. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Terkait pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih, yaitu Bawaslu telah merekomendasikan untuk melakukan pencoklitan (pencocokan dan penelitian) coklit ulang, yaitu ada di delapan kecamatan. Dan telah ditindaklanjuti oleh petugas KPU, yakni PPDP, bukti ada pada tabel PK-02, PK-03, dan PK-04.

Dan yang mau kami sampaikan lagi, yakni pada halaman 8 sampai dengan halaman 44.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

645. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Bahwa terda ... terhadap pokok Permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didalilkan Pemohon pada tabel 4 halaman 9 sampai dengan tabel 26 halaman 44.

Bawaslu Kabupaten Malaka menerangkan bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 4 di atas bahwa Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajaran tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran, atau laporan, serta tidak ada keberatan saksi.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu saya minta ketegasan begini.

Di dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara), kemudian menjadi DPT, itu dilakukan pemutakhiran, enggak?

647. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Dilakukan.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilakukan pemutakhiran. Pada waktu dilakukan pemutakhiran itu, akhirnya dilakukan sidang pleno untuk penetapan DPT atau tidak?

649. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Dilakukan.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilakukan. Siapa yang hadir dalam penetapan DPT?

651. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Dalam penetapan DPT itu, yang hadir KPU (...)

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU.

653. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Bawaslu (...)

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu.

655. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Bersama (...)

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Seluruh pasangan calon?

657. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Tim dari pasangan calon seluruhnya.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Seluruh tim pasangan calon?

659. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu itu, saksi-saksi dari seluruh pasangan calon menandatangani DPT final, enggak?

661. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

DPT yang ditandatangani KPU.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi saksi-saksi hadir di situ?

663. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Hadir menandatangani.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada (...)

665. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Daftar hadir.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Daftar hadir ditandatangani, ya?

667. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau begitu DPT tidak ada persoalan, ya?

669. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Tidak ada persoalan.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena so ... ada keberatan di situ?

671. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Tidak ada keberatan.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, mengenai DPT sudah kita selesaikan. Terus, ada lagi yang lain? Itu keterangan Anda sampai halaman 45 berarti, ya?

673. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya, benar.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus!

675. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Mulai dari ... kalau untuk pemilih siluman cukup, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti, kan sudah tidak ada pemilih siluman?

677. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

679. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena seluruh DPT sudah disahkan dan semua saksi yang hadir, kan hadir semua?

681. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, ada lagi?

683. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Pada keterangan tambahan, Yang Mulia.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keterangan tambahan, gimana?

685. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Keterangan tambahan itu halaman 49 sampai 52.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 49 sampai 52?

687. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apa itu? Yang penting yang perlu disampaikan (...)

689. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Yang poin 2 ... yang poin 2.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai dengan dalilnya Pemohon apa?

691. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Poin 2, Yang Mulia.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin 2, he eh.

693. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Malaka telah menerima laporan dengan Nomor 010/LP/PB/Bawaslu-Kabupaten/19.22/1/2021 (...)

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu nomornya.

695. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya. Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan terhadap pemilih siluman sebanyak 2.039 pemilih dalam DPT yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Malaka atas nama Makarius Bere Nahak, dan yang lainnya terbaca. Dan pelapor atas nama Primus Seran Taek yang merupakan tim hukum ... salah satu tim hukum dari Pasangan Calon Nomor 02.

Bahwa (...)

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus!

697. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Setelah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat materiil dan formil, laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 010 sampai seterusnya terbaca.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

699. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan bukti-bukti. Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan Nomor 10 (...)

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan seterusnya.

701. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Dan seterusnya terbaca. Bawaslu Kabupaten Malaka setelah melakukan pembahasan bertama tim ... bersama tim, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak terbukti.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak terbukti?

703. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya, melakukan tindakan pelanggaran pemilihan dan (...)

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Buktinya PK-37 itu?

705. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

PK-37.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi? Cukup, ya?

707. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Tambahan yang saya sampaikan bahwa di dalam PK-37 ini, yang buktinya itu bahwa dari 2.039 pemilih siluman dalam DPT yang dilaporkan oleh pelapor ini (...)

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

709. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Berdasarkan hasil sinkronisasi.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

711. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

DPT yang dikasih oleh Bupati Malaka.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

713. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Dokter Stefanus Bria Seran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, tadi yang juga disinggung oleh (...)

715. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Dan ... ya.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Termohon itu, ya?

717. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

719. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Dan DPT tersebut setelah kita selidiki, kita cermati ulang, dan DPT tersebut bukan DPT yang digunakan atau produk KPU yang digunakan pada tanggal 9 Desember untuk pemungutan suara.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

721. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Cukup, ya?

723. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Cukup.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ini Pak siapa ini yang ... anu ... Ketuanya Pak Petrus?

725. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Petrus Nahak Manek.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

727. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Saya sendiri.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga-tiganya tanda tangan, ya?

729. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Siap.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, ya?

731. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Ya.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini dirapatkan pleno, berarti?

733. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Rapatkan pleno.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih.

735. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Terima kasih, Yang Mulia.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang saya mengesahkan bukti. Prof. Saldi, ada, cukup? Yang Mulia Prof. Manahan, cukup?

Baik, kalau gitu, saya sahkan buktinya. Perkara P ... Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, Anda mengajukan Bukti P ... ini T, kan? Ini bukti tambahan, apa? Oke, ya. Pemohon, kemarin mengajukan bukti tambahan, ya, sebelum sidang selesai, ya? Sudah diverifikasi, Bukti tambahannya P-1 sampai dengan P-13, ya? Eh, sori. P-13 sampai dengan P-16, betul? Ya, disahkan, ya. Tambahan alat bukti disahkan sekarang. P-13 sampai P-16.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-14?

737. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Benar, Yang Mulia.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-9, betul?

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Benar, Yang Mulia.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Bawaslu mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-9. Bawaslu, betul? Betul. Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Catatan untuk Pemohon, itu soft copy-nya belum diserahkan. Ya, tolong diserahkan sekarang, ya, selesai sidang ini, ya, softcopy-nya! Baik.

Kemudian, Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Malaka. Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan yang kemarin, tidak. Terus sekarang ... ha, Pemohon? Oke. Ya, Pemohon ini daftarnya enggak jelas ini. Tambahan bukti Pemohon P-16.1, P-5.25 sampai P-5.52, P-21.1 sampai dengan P-36, itu yang bisa diverifikasi, ya? Ini catatan-catatan nanti coba dihubungi. Jadi, yang bisa diverifikasi karena tidak jelas itu, ini disahkan P-16.11, P-5.25 sampai dengan P-5.52, dan P-21.1 sampai dengan P-36.

KETUK PALU 1X

Ya, yang lain sudah pernah disahkan.
Kemudian (...)

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BRAM PERWITA ANGGADATAMA

Mohon izin, Yang Mulia.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BRAM PERWITA ANGGADATAMA

Mohon izin untuk melengkapi bukti yang belum ada.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti coba ... tinggal melengkapi saja, ya. Di luar itu, tambahan lagi sudah tidak bisa, ya?

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BRAM PERWITA ANGGADATAMA

Ini masih berkaitan dengan Bukti P-5.25.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti coba ke Kapaniteraan, ya!

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BRAM PERWITA ANGGADATAMA

Baik, Yang Mulia.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau itu berupa tambahan baru, sudah bisa ... sudah tidak bisa diterima.

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BRAM PERWITA ANGGADATAMA

Baik, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kemudian, Termohon, mengajukan bukti?

751. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Kami mengajukan bukti, Yang Mulia, ada 45 bukti yang kami sudah ajukan dan sudah kami masukkan buktinya.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT

T-1 sampai dengan T-45, ya?

753. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ada beberapa catatan pemeriksaan buktinya. T-28 bukti fisiknya Desa Kamanasa kurang TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 7. Ini ada beberapa catatan. Jadi saya sahkan T-1 sampai T-45, dengan catatan-catatan ini menyangkut T-28, ya, T-29, T-30, dan T-32. Itu ada catatan, nanti diselesaikan di Kapaniteraan, ya?

Disahkan T-1 sampai T-45 dengan catatan-catatan tadi.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-16? Baik, disahkan. Sudah lengkap dan baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK-1 sampai PK-37, lengkap?

755. BAWASLU KABUPATEN MALAKA: PETRUS NAHAK MANEK

Benar, Yang Mulia.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021 sudah selesai. Saudara tinggal menunggu. Jadi, seluruh apa yang sudah disampaikan dalam 2 kali persidangan ini akan disampaikan oleh Hakim Panel, kita bertiga, dalam Sidang Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diambil keputusan. Apakah perkara ini lanjut atau tidak lanjut, nanti akan diperiksa oleh 9 orang Hakim, Anda tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya. Apabila perkara Anda itu lanjut, maka semua pihak masih dapat mengajukan bukti, saksi, atau ahli dalam persidangan yang akan datang, ya? Ada pertanyaan? Ada yang akan disampaikan?

757. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA

Izin, Yang Mulia.

758. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Termohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021?

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan Pihak Pemohon menyampaikan satu hal terkait dengan tindakan Termohon dalam minggu ini setelah sidang pendahuluan dan memasuki sidang pemeriksaan persidangan. Boleh, Yang Mulia?

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu?

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA

Jadi, setidaknya-tidaknya pada tanggal 27 Januari 2021, Termohon untuk Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan tindakan pembukaan kotak untuk TPS ... setidaknya-tidaknya untuk TPS 001 Desa Manu Kuku dan kemungkinan besar TPS 001 Kelurahan Wee Karou. Tindakan tersebut didasarkan pada Surat KPU RI Nomor 1232 bulan 12 Tahun 2020. Surat dimaksud, kami membaca itu didasarkan pada PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 71.

Hal yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah dalam PKPU tersebut ada kewajiban untuk menghadirkan pihak kepolisian dan Bawaslu kabupaten, ya. Dan bahkan dalam beberapa daerah yang lain, selain 2 pihak tersebut, juga menghadirkan pasangan calon.

Nah (...)

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kita ... kita mengerti itu.

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA

Ya, mohon untuk dicatat dalam kejadian tanggal 27 (...)

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dicatat dalam persidangan dan nanti akan menjadi (...)

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA

Yang Mulia, Pihak Bawaslu tidak hadir.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA

Tolong di ... minta tolong untuk dicatat, Yang Mulia. Terima kasih.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.

Dari Pemohon Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021, enggak ada? Cukup?

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BRAM PERWITA ANGGADATAMA

Cukup, Yang Mulia.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari Termohon?

772. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ada, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

774. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Yang pertama, terkait dengan (...)

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Termohon Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

776. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Saya Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia,

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIX/2021? Oke.

778. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Yang pertama kami untuk kelengkapan administrasi kami, kami meminta daftar alat bukti, Yang Mulia. Entah dari Pemohon atau pun Pihak Terkait. Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk perkara yang dinyatakan lanjut ke ... apa ... ke Permohonan (...)

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemarin apa Anda tidak minta inzage pada Majelis?

780. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Inzage sudah, tapi kami meminta bukti ... apa ... minta daftar alat buktinya, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Daftar alat buktinya?

782. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti ke Kapaniteraan.

784. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Daftar alat bukti, ya?

786. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

788. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ya, baik. Terima kasih. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua. Apabila terhadap perkara yang setelah tadi Majelis sampaikan ada ... apa ... Rapat Permusyawaratan Majelis, yang lanjut. Kira-kira Yang Mulia memberikan berapa orang saksi (...)

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti diberitahukan Kepaniteraan secara resmi.

790. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Oh, belum ya, Yang Mulia?

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum, ya.

792. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia. Sudah jelas. Terima kasih.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, KPU Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021?

794. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Izin, Yang Mulia. Nanti disampaikan secara langsung oleh (...)

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai pembukaan itu?

796. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: MELKIANUS NDAOMANU

Ya, mengenai pembukaan, sehingga menjadi catatan juga dalam persidangan ini.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disingkat. Nanti dicatat dalam persidangan. Saudara membuka kotak suara itu untuk kepentingan apa? Saya tanya.

798. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Baik, terima kasih.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ... sudah masuk.

800. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam rangka ... KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka mengambil alat bukti (...)

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

802. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Yang berada dalam kotak suara.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Siapa yang menyaksikan pada waktu membuka kotak suara?

804. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Kami sebelum melakukan pembukaan kotak suara itu, kami bersurat kepada Kepolisian Resor Kabupaten Sumba Barat dan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

806. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Dan pada saat proses pembukaan, yang hadir pada kegiatan itu hanya dari pihak Kepolisian Kabupaten Sumba Barat, sedangkan dari Bawaslu tidak bersedia untuk hadir, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

808. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Kemudian, dasar dari pembukaan kotak suara itu sesuai disampaikan tadi, sesuai dengan Pasal 71 PKPU Nomor 19 Tahun 2020, yang mana angka 1 berbunyi, "KPU Provinsi, KIP Aceh, dan KPU kabupaten/kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan."

Kemudian, yang kedua (...)

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah, enggak usah dibacakan itu, kita sudah tahu.

810. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Baik. Mungkin itu. Demikian, Yang Mulia.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, Anda membuka kotak suara, ada undangannya?

812. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Ada undangan.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang diundang?

814. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Kepolisian dan Bawaslu.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kepolisian dan Bawaslu.

816. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Siap, Yang Mulia.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang kedua, pada waktu dibuka, polisi hadir?

818. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Hadir, Yang Mulia. Kapolres sendiri hadir.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapolres sendiri hadir.

820. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Ya.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian dalam pembukaan itu, ada Berita Acara?

822. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Ada, Yang Mulia.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu dijadikan bukti enggak tadi?

824. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Belum, Yang Mulia.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum?

826. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Ya.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik. Cukup, ya?

828. TERMOHON PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: TEGUH RAHARJO

Terima kasih, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait, cukup, ya? Enggak ada masalah, ya?

830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHP.BUP-XIX/2021: RIAN VAN FRITS KAPITAN

Siap, Yang Mulia.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sidang (...)

832. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa lagi ini?

834. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Ini terkait dengan catatan tadi dari Yang Mulia mengenai ... mengenai bukti dari kami. Ada sedikit penjelasan dari Anggota KPU Bidang Hukum dari Malaka. Izin, Yang Mulia.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa? Kenapa?

836. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: BUDI RAHMAN

Silakan, Bung Stev!

837. TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021: STEVANUS MANHITU

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan kekurangan yang dibacakan oleh Yang Mulia tadi. Sedikit saya menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, KPU Kabupaten Malaka melakukan pembukaan kotak ... pembukaan kotak suara dan kami mengambil alat bukti. Dan terkait dengan T-29 dan seterusnya, itu adalah Form C keberatan, yang mana begitu kami ambil dari dalam kotak, fakta yang terjadi bahwa kami ambil dalam keadaan form itu kosong, sehingga kami buktikan apa yang kami keluarkan dari kotak.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti ... anu ... diselesaikan dengan Kapaniteraan.

**839. TERMOHON PERKARA NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021:
STEVANUS MANHITU**

Terima kasih, Yang Mulia.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.49 WIB

Jakarta, 1 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

